

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Selasa, 11 Juni 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Kliping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Hal. 2)	Selasa, 11 Juni 2019	Opini	Pembangunan jalan tol penting untuk memperlancar mobilitas barang dan orang lebih cepat, agar harga bahan pokok menjadi makin murah di berbagai kawasan di Indonesia
2	Bisnis Indonesia (Hal. 2)	Selasa, 11 Juni 2019	Benang Kusut di Rest Area	Ada pemandangan yang terus ditemukan pada musim Lebaran, tempat istirahat yang padat dan penuh, serja berjejer kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Hal ini menjadi pemicu kemacetan saat arus balik
3	Bisnis Indonesia (Hal. 6)	Selasa, 11 Juni 2019	Ganjar Berharap Groundbreaking Dilakukan Tahun Ini	Pemprov Jateng berharap peletakan batu pertama pembangunan proyek tol Bawen-Yogyakarta dapat dilakukan tahun ini
4	Bisnis Indonesia (Hal. 17)	Selasa, 11 Juni 2019	Berita Foto	Tol layang Cikampek akan dilakukan uji laik pada September 2019.
5	Bisnis Indonesia (Hal. 18)	Selasa, 11 Juni 2019	Penjualan UMKM Tergerus	Dampak jalan tol yang mengurangi volume kendaraan yang melintasi jalan arteri, yang menjadi lokasi para pelaku UMKM menggelar dagangannya
6	Bisnis Indonesia (Hal. 19)	Selasa, 11 Juni 2019	Desain Akan Diubah demi Kenyamanan	Kementerian PUPR akan mengubah desain rest area agar tidak terjadi penumpukan kendaraan pada musim mudik mendatang
7	Bisnis Indonesia (Hal. 19)	Selasa, 11 Juni 2019	Berita Foto	Kementerian PUPR dan pengembang optimis akan dapat lebih semangat membangun rumah warga hingga mencapai Sejuta Rumah
8	Bisnis Indonesia (Hal. 19)	Selasa, 11 Juni 2019	Banyak Negara Tertarik Program Sejuta Rumah	Program Sejuta Rumah yang dilakukan Pemerintah Indonesia kini menjadi rol model pembangunan rumah di negara-negara berkembang lain
9	Media Indonesia (Hal. 6)	Selasa, 11 Juni 2019	Opini	Paradoks kemajuan perkotaan, si sisi banyak masyarakat yang menikmati kemajuan ekonomi masih banyak yang mengalami kekurangan
10	Media Indonesia (Hal. 10)	Selasa, 11 Juni 2019	Cegah Penumpukan, Pengaturan Rest Area akan Dibenahi	Dinilai perlu ada manajemen yang baik dalam pengelolaan rest area
11	Media Indonesia (Hal. 11)	Selasa, 11 Juni 2019	Pemerintah Terus Bangun Rumah Tahan Gempa	Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 8.500 rumah tahan gempa pada 2019
12	Media Indonesia (Hal. 11)	Selasa, 11 Juni 2019	Program Setuja Rumah Raih Penghargaan	Penghargaan diberikan Federasi Real Estate Dunia (FIABCI) dalam kongres dunia yang berlangsung di Moskow, Rusia.
13	Kompas (Hal. 15)	Selasa, 11 Juni 2019	Target 2,4 Juta Wisman	Pemkot Batam perbaiki akses transportasi dan mengenalkan destinasi baru untuk wisatawan
14	Kompas (Hal. 1)	Selasa, 11 Juni 2019	Angkutan Massal Mendesak Dibenahi	Angkutan massal untuk mudik Lebaran mendesak dibenahi agar menarik minat masyarakat

Judul	Opini	Tanggal	Selasa, 11 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Hal. 2)		
Resume	Pembangunan jalan tol penting untuk memperlancar mobilitas barang dan orang lebih cepat, agar harga bahan pokok menjadi makin murah di berbagai kawasan di Indonesia		

Menuai Manfaat Proyek Jalan Tol

Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan seringkali menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tol sangat penting untuk memperlancar mobilitas orang dan barang dengan lebih cepat. Jika hal tersebut berhasil dilaksanakan, maka harga bahan pokok menjadi makin murah di berbagai kawasan di Indonesia.

Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur yang gencar dapat dijadikan sebagai indikator penunjang kemakmuran di daerah. Lebih luas lagi, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh pelosok negeri akan mewujudkan prinsip keadilan sosial.

Infrastruktur yang baik turut menjadi roda penggerak sejumlah sektor di daerah. Salah satu contohnya adalah tersambungannya tol Trans-Jawa dari Merak, Banten hingga Probolinggo, Jawa Timur mendorong tingginya tingkat hunian kamar hotel atau okupansi di sejumlah daerah.

Selama libur Idulfitri 2019, tercatat okupansi di sekitar ruas tol Trans-Jawa naik sekitar 5% dibandingkan dengan periode Lebaran tahun lalu.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)

Hariyadi B. Sukamdani menjelaskan bahwa tersambungannya ruas tol Trans-Jawa, termasuk tol Trans-Sumatra pada libur Lebaran tahun ini menarik minat masyarakat untuk mencoba ruas tol tersebut.

Akibatnya, tingkat okupansi hotel, khususnya di sejumlah wilayah yang dilalui oleh kedua tol tersebut, pada periode libur Lebaran tahun ini turut terkerek.

Berdasarkan data PHRI, tingkat okupansi hotel di lingkaran pertama tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra, yakni daerah destinasi wisata, mencapai 100%. Sementara itu, untuk wilayah lingkaran kedua yang dekat dengan destinasi wisata dan ruas tol, tingkat okupansi hotelnya mencapai 85%.

Adapun, untuk di wilayah lingkaran yang ketiga alias yang jauh dari destinasi wisata maupun tol, tingkat okupansi hotelnya mencapai 65%. Okupansi hotel pada libur Lebaran tahun ini meningkat sekitar 3% hingga 5% jika dibandingkan dengan libur Lebaran tahun lalu.

Tersambungannya ruas tol Trans-Jawa ini juga menjadi alternatif para pemudik yang memilih berkendara menggunakan mobil pribadi karena tiket pesawat yang mahal. Mengambil contoh di

Daerah Istimewa Yogyakarta, tingkat okupansi hotel selama libur Lebaran ini mencapai 90% hingga 100%.

Sementara itu, di daerah Jawa Timur, rerata okupansi hotel di Surabaya mencapai 68%, sedangkan untuk di daerah di luar Surabaya, khususnya di tempat-tempat tujuan wisata, tingkat okupansi hotelnya mencapai 82%.

Angka tersebut jauh melampaui tingkat okupansi hotel pada tahun sebelumnya. Di mana, pada tahun lalu okupansi hotel di Surabaya mencapai 52%, sedangkan di tempat wisata lain di Jawa Timur mencapai 80%.

Berkah tersambungannya ruas tol Trans-Sumatra yakni dari Bakauheni hingga Indralaya juga berdampak pada kenaikan okupansi hotel di bumi Andalas saat libur Lebaran tahun ini. Tingkat okupansi hotel di Sumatra Selatan pada tahun ini mencapai 70% hingga 80%.

Tingginya tingkat okupansi hotel ini seperti menjawab keresahan para pelaku usaha perhotelan yang mengeluhkan mahalnya tiket pesawat. Bahkan sebelumnya, Menteri Pariwisata Arief Yahya juga mengkhawatirkan dampak dari kenaikan tiket pesawat pada tingkat oku-

pansi hotel, dan juga wisatawan Nusantara.

Tersambungannya ruas tol Trans-Jawa tidak hanya menuai manfaat dari sisi tingginya okupansi hotel. Proyek ini menjadi bukti kesiapan negara dalam menyongsong peradaban yang serba mudah dan serba cepat dalam setiap melakukan aktivitas.

Hal ini juga dilakukan oleh sejumlah negara antara lain China. Pemerintah China memacu perekonomian dengan mengencarkan proyek infrastruktur, utamanya jalan tol. Melalui koneksi jalan tol ini, maka China berhasil memajukan daerah terpencilnya.

Di luar dampak negatifnya terhadap stabilitas sosial budaya masyarakat lokal, jalan tol membuat Pemerintah China dapat lebih maksimal mengeksplorasi kemampuan ekonomi di daerah, sehingga menjadi raksasa ekonomi dunia.

Kembali lagi, pembangunan infrastruktur jalan bebas hambatan atau jalan tol dapat menjadi tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kemajuan perekonomian suatu negara, baik secara makro maupun secara mikro. Hal itu dapat dilihat dari tol Trans-Jawa yang menjadi proyek multimanfaat. 

Judul	Benang Kusut di Rest Area	Tanggal	Selasa, 11 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Hal. 2)		
Resume	Ada pemandangan yang terus ditemukan pada musim Lebaran, tempat istirahat yang padat dan penuh, serja berjejer kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Hal ini menjadi pemicu kemacetan saat arus balik		



➤ ARUS BALIK LEBARAN 2019

Benang Kusut di Rest Area

Dalam perjalanan dari Semarang hingga Cipali saat arus balik, ada dua pemandangan yang terus ditemukan Tim Jelajah Lebaran Jawa-Bali 2019 di sepanjang jalan, yakni tempat istirahat (*rest area*) yang padat dan penuh, serta berjejer kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Inilah dua hal yang disebut-sebut menjadi biang kerok kemacetan saat arus balik.

Tim Jelajah Jawa-Bali 2019
redaksi@bisnis.com

Jalan tol Trans-Jawa disebut-sebut sebagai salah satu kunci sukses lancarnya perjalanan mudik Lebaran pada tahun ini. Pasalnya, jalan tol sepanjang 1.167 kilometer itu menjadi primadona bagi para pemudik yang akan menuju timur Pulau Jawa.

Namun, saat arus balik, kemacetan di tol juga tak terhindarkan. Bahkan, menjadi lebih parah dibandingkan dengan sebelumnya.

Tim Jelajah Lebaran Jawa-Bali 2019 yang terjun langsung untuk merasakan momen migrasi musiman masyarakat Indonesia dari Ibu Kota hingga ke Pulau Dewata sebagai tujuan akhirnya, juga turut merasakan kemacetan pada saat arus balik.

Tim Jelajah—terdiri atas dua grup—dibersangatkan sejak Rabu (29/5) sore dari Jakarta dan sudah tiba kembali di Jakarta pada Minggu (9/6).

Program Liputan Lebaran Jelajah Jawa-Bali 2019 ini didukung oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Suzuki Indomobil Sales, PT Telekomunikasi Selular, PT Astra International Tbk. - buana Sales Operation, PT Mitra Pinaethika Mudi-

ka Rest, PT XL Axiata Tbk., PT Astra Toll Nusantara, Pertamina LPPNPI (Airmas Indonesia), PT Astra Honda Motor, PT Samsung Electronics Indonesia, dan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir.

Tahun ini, instansi terkait memberi beberapa jurus itu untuk menjamin kelancaran bagi pemudik yang menggunakan jalan tol Trans-Jawa.

Skema jalur satu arah atau one way ataupun skema melawan arus atau *contraflow* disiapkan pihak kepolisian dan pengrus jalan tol secara situasional. Dua skema ini juga digencarkan pada saat arus balik.

Mobil Tim Jelajah mulai menyusuri jalanan untuk kembali ke Ibu Kota pada Sabtu (8/6).

Di beberapa titik, lalu lintas lancar sehingga kendaraan dapat dipacu kencang, tetapi kepadatan kendaraan mulai terjadi selepas ruas tol Semarang-Solo.

Saat malam hari, begitu banyak pemandangan kendaraan dengan pintu terbuka, lampu menyala, dan orang-orang tertidur di dalamnya. Sebagian lain tampak beristirahat di luar kendaraan, kebanyakan laki-laki.

Selanjutnya, Tim Jelajah bahkan menemukan pemudik yang menggelar tikar atau alas duduk di belakang mobilnya yang berhenti. Tampak anak kecil yang sedang duduk sambil

minum, sedangkan orang tuanya menyender di pembatas jalan.

Idealnya, para pemudik tersebut beristirahat di *rest area*, seperti yang diimbau oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagai pengelola jalan tol.

Akan tetapi, banyak pengemudi yang akhirnya berhenti di bahu jalan karena berhadapan dengan kondisi di lapangan, yakni menumpuknya kendaraan di hampir semua tempat istirahat.

Tempat istirahat yang dilalui Tim Jelajah Lebaran Jawa-Bali 2019 terpadat selalu dipenuhi kendaraan pemudik. Bahkan, di beberapa tempat istirahat, antrian kendaraan tampak mengekor hingga ke luar pintu masuk.

Pengalaman berbeda dirasakan oleh tiap-tiap grup. Grup A, misalnya. Sekitar pukul 05.30 pada Minggu (9/6), grup A Tim Jelajah akhirnya bisa masuk ke tempat istirahat KM 130 jalan tol Cipali untuk beristirahat. Grup ini cukup beruntung karena bisa mendapatkan tempat parkir. Beberapa menit beres, kendaraan semakin berhemuran. Akibatnya, banyak kendaraan yang akhirnya tidak mendapatkan tempat parkir.

Lain halnya dengan grup B. Dalam kondisi yang masih terjebak kemacetan parah di ruas tol Jakarta-Cikampek pada Minggu (9/6) pagi sekitar pukul 05.00, grup tersebut berhenti untuk menepi dan beristirahat sejenak di tempat istirahat KM 39.



lelah, mereka memilih beristirahat di bahu jalan.

"Kadang kami juga mau mengatahkan mereka untuk tidak di situ, tetapi tidak ada opsi lain, kasihan juga sih. Akan tetapi, dampaknya ke kemacetan," ujar Budi, Senin (10/6).

Dia pun memaklumi keperluan dasar pemudik, seperti makan, buang air, dan istirahat. Namun, hal itu besakumulasi dan menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan tol.

Setiap tiga uang, peneliti Masyarakat Transportasi

Namun, hal itu sulit diwujudkan layanan mobil grup tersebut berada di jalur tengah. Sementara itu, kepadatan kendaraan sudah sangat parah sehingga sulit untuk bermanuver demi mendapatkan jalan memasuki tempat istirahat.

Tak bisa beristirahat, tim ini akhirnya melanjutkan perjalanan. Ketika melintas di depan *rest area* KM 39 tersebut, tampak dari kaca mobil lokasi tersebut ditutup sementara oleh Kepolisian.

Dari kendaraan, sayup-sayup terlihat progress suara, agar pengguna tempat istirahat tidak berlama-lama di dalam lokasi tersebut dan memberi kesempatan kepada pengguna jalan tol lain.

Pengelola memberi kesempatan kepada para pengguna *rest area* untuk tidak parkir lebih dari 1 jam.

Situasi kesulitan untuk menepi di tempat istirahat juga dirasakan ketika keluar dari tol Jakarta-Cikampek melalui gerbang tol Cikarang Utama 3.

Beberapa tempat istirahat yang dilwati sepiatan sangat padat dan tidak dapat dimasuki kendaraan lagi.

TAK ADA PILIHAN

Dejen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengungkapkan banyak pemudik yang kelelahan sehingga memilih untuk beristirahat, dan karena sudah terlalu

Indonesia sekaligus pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno menilai pemudik yang berhenti sembarangan menyebabkan kemacetan di jalan tol Trans-Jawa.

Selain menyebabkan kemacetan, kendaraan yang berhenti di bahu jalan tol pun melanggar aturan. Oleh karena itu, pemudik diimbau untuk keluar jalan tol terlebih dahulu untuk beristirahat.

Hal itu dinilai dapat menjadi solusi karena tempat istirahat selalu penuh pada masa mudik dan arus balik. Selain itu, terdapat banyak pilihan kuliner dan lokasi istirahat yang memadai di luar jalan tol.

"Keberadaan *rest area* di tol memang tidak akan mencukupi saat musim mudik dan balik Lebaran setiap tahun. Di sisi lain, tidak bijak juga memakai BRJT [Badan usaha jalan tol] untuk menambah *rest area* baru yang hanya digunakan selama 2 minggu. Investasinya cukup mahal," ujar Djoko.

Adapun, dari sisi pemudik, Djoko berharap agar mereka semakin mengerti batas kemampuan tubuh dan selalu mengedukasi diri dengan informasi-informasi sepanjang perjalanan.

Eloknya, perkarat istirahat tidak perlu menjadi masalah dalam hajatan akhir tahunan di Indonesia. Belajar dari tahun ini, tahun depan harus lebih baik lagi. ■



Ganjar Berharap Groundbreaking Dilakukan Tahun Ini

Bisnis, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap pelaksanaan pembangunan tol Bawen-Yogyakarta dapat dilakukan pada tahun ini. Beberapa hal seperti penentuan lokasi, perizinan, dan analisis dampak lingkungan sedang dalam proses.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan lupa-lupa untuk proyek tol Bawen-Yogyakarta tersebut ketika sudah terdapat lokasi-lokasi yang ditetapkan. "Kalau bisa tahun ini sudah groundbreaking," kata Ganjar di Semarang, Senin (10/6).

Dia menjelaskan, penentuan lokasi dan analisis dampak pembangunan tol Bawen-Yogyakarta merupakan contoh bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selain pembebasan lahan jika terdapat lahan yang perlu dibebaskan untuk proyek tersebut.

Saat ini, dia menuturkan, proses penentuan lokasi untuk proyek

tersebut sedang dalam proses. Kondisi ini, ujarnya, berjalan paralel dengan pengurusan izin-izin dan analisis dampak lingkungan yang diperlukan untuk proyek tersebut.

Lokasi-lokasi yang akan ditetapkan untuk jalur proyek tol Bawen-Yogyakarta, dia menuliskan agar secara keseluruhan harus aman.

Oleh karena itu, lokasi-lokasi yang akan ditetapkan untuk jalur tol Bawen-Yogyakarta perlu memperhatikan beberapa pertimbangan, seperti tidak melewati lahan subur, jauh dari daerah rawan bencana, dan tidak melewati kawasan cagar budaya atau heritage.

Menurutnya, biaya pembangunan proyek jalan tol Bawen-Yogyakarta akan mengalami peningkatan jika lokasi yang ditetapkan untuk proyek tersebut menambah jalur yang harus dibangun semakin panjang.

Saat ini, tambahnya, perhitungan pembangunan pembiayaan proyek jalan tol tersebut berada di pemerintah pusat. Daerah, ujarnya,

hanya mendukung.

"Menurut saya ada tiga kemungkinan antara Yogyakarta - Semarang atau Jember atau Bawen-Yogyakarta merupakan kawasan dalam pengembangan kawasan Yogyakarta. Solo, dan Semarang akan Jember."

"Menurut saya ada tiga kemungkinan antara Yogyakarta - Semarang atau Bawen-Yogyakarta merupakan kawasan dalam pengembangan kawasan Yogyakarta. Solo, dan Semarang akan Jember."

DISIAPKAN

Hedy Rahadian, Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perikatan, Ditjen Ritu Marga Kementerian PUPR, mengungkapkan, usulan penentuan lokasi untuk proyek tol Bawen-Yogyakarta sedang disiapkan.

Menurutnya, usulan penentuan lokasi tersebut masih perlu dilengkapi dengan beberapa hal seperti *right of way* plan dan dokumen penyajian pengajuan tanah (DPPPT).

"Sedang disiapkan usutunya masih perlu dilengkapi," katanya. Dia menambahkan, dokumen

usulan penentuan lokasi pembangunan proyek tol Bawen-Yogyakarta untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DIY diungkapkan dalam satu badan ini masih diselesaikan oleh konsultan.

Kepala Badan Pengantar Jalan Tol (BPJT) Danang Partikesit mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya menunggu hasil dari Ditjen Ritu Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk rencana fase supaya bisa diwujudkan.

"Kalau dari kami, BPJT, saya mau menunggu hasil dari Ritu Marga untuk rencana fase supaya bisa diwujudkan," katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan laman Komite Penyelapan Penyelenggaraan Infrastruktur Prioritas (KPPPT) yang dilantik Ridoris, proyek jalan tol Bawen-Yogyakarta memiliki panjang 71 kilometer dengan nilai investasi total sebesar Rp12,14 triliun.

Masih dalam kurun KPPPT, proyek tersebut direncanakan mulai konstruksi pada 2019 dan beroperasi pada 2021.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggalan pertumbuhan pariwisata di Jawa Tengah pada masa libur Lebaran tahun ini mengalami peningkatan.

"Pariwisata bagus, naik terus, bisa dan trennya memang libur meningkat. Kemudian saya sempat, melihat di beberapa tempat, bagus kok itu," kata Ganjar Pranowo.

Ganjar menjelaskan, pihaknya memang belum menghitung berapa persentase kenaikan di sektor pariwisata Jawa Tengah selama masa libur Lebaran tahun ini. Akan tetapi, tambahnya, selalu ada peningkatan.

Dia mengungkapkan, dirinya sudah melihat terdapat geliat pergerakan pariwisata Jawa Tengah sebelum memasuki Lebaran tahun ini.

"Bukan dihitung. Tapi, selalu ada peningkatan. Kemudian saya mengecek sebelum liburan sudah kelihatan, sudah kelihatan gerainya," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Te-

ngah yang dilantik Ridoris, tingkat pertumbuhan kamar (TPK) hotel berbintang di Jawa Tengah pada April 2019 tercatat sebesar 45,86%, atau tumbuh 0,54 poin dibandingkan dengan TPK pada Maret tahun ini, yakni 45,32%.

TPK pada April 2019 tertinggi terjadi di hotel bintang 4, yaitu sebesar 50,08 persen dan terendah adalah TPK hotel berbintang 1 sebesar 31,93%.

Kemudian, rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada April 2019 tercatat sebesar 1,27 malam, turun 0,04 poin dibandingkan rata-rata lama menginap pada Maret tahun ini, yaitu 1,31 malam.

Adapun rata-rata lama menginap tamu hotel manunggal pada April 2019 tercatat sebesar 2,03 malam atau turun 0,11 poin dibandingkan dengan RLM pada Maret 2019, yakni 2,14 malam.

Sementara RLM domestik tercatat 1,26 malam atau turun 0,04 poin dibandingkan dengan periode Maret yang mencapai 1,30 malam.

(Yusuf Sapriyanto)

Judul	Ganjar Berharap Groundbreaking Dilakukan Tahun Ini	Tanggal	Selasa, 11 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Hal. 6)		
Resume	Pemprov Jateng berharap peletakan batu pertama pembangunan proyek tol Bawen-Yogyakarta dapat dilakukan tahun ini		

Judul	Berita Foto	Tanggal	Selasa, 11 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Hal. 17)		
Resume	Tol layang Cikampek akan dilakukan uji laik pada September 2019.		

► TOL LAYANG CIKAMPEK UJI LAIK SEPTEMBER



Kendaraan melintas di dekat proyek pembangunan Light Rapid Transit (LRT) dan tol layang Jakarta - Cikampek, di Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/6). PT Jasa Marga (Persero) Tbk. akan melakukan uji laik fungsi pada jalan Tol Jakarta-Cikampek elevated pada September 2019.

Bisnis/Devil Gahawan

Judul	Penjualan UMKM Tergerus	Tanggal	Selasa, 11 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Hal. 18)		
Resume	Dampak jalan tol yang mengurangi volume kendaraan yang melintasi jalan arteri, yang menjadi lokasi para pelaku UMKM menggelar dagangannya		

► DAMPAK TOL TRANS-JAWA

Penjualan UMKM Tergerus

Bisnis, JAKARTA — Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendesak pemerintah dan pengelola jalan tol konsisten menyediakan slot khusus bagi mereka di tempat istirahat dan pelayanan (TIP) tol Trans-Jawa.

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan, saat ini pelaku UMKM di daerah yang dilintasi Trans-Jawa tengah mengalami keterpurukan karena turunnya penjualan. Pasalnya, kehadiran jalan bebas hambatan tersebut mengurangi volume kendaraan yang melintasi jalur arteri, yang menjadi lokasi para pelaku UMKM menggelar dagangannya.

“Kalau ditotal, untuk momentum Lebaran saja, penurunan penjualan UMKM di sekitar jalur pantai utara dan wilayah lain yang dilintasi tol bisa mencapai 70%. Tentu kondisi ini menjadi beban bagi para pelaku UMKM,” katanya, Senin (10/6).

Dia mengatakan, hal itu sejatinya merupakan situasi alamiah yang terjadi akibat perkembangan infrastruktur nasional. Namun, dampak kehadiran tol Trans-Jawa terhadap penjualan UMKM

dapat ditekan apabila para pelaku UMKM diberikan ruang yang lebih di *rest area* di dalam tol.

Ikhsan mengaku, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.10/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol. Dalam aturan itu, TIP jalan tol yang telah beroperasi wajib menyediakan lahan untuk UMKM dan koperasi sebanyak 20%, sedangkan untuk tol baru sebesar 30%.

Namun, menurutnya, saat ini porsi UMKM di TIP Trans-Jawa masih sekitar 10% dari lahan yang tersedia. Di sisi lain, para pelaku UMKM juga terbebani oleh tarif sewa lahan di TIP yang tergolong tinggi bagi pelaku UMKM.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahya Widayanti menyatakan, pemerintah akan membantu agar pelaku UMKM dapat bersaing. “Kami sering mengadakan pelatihan pemasaran UMKM, terutama pemasaran dalam bentuk daring. Hal itu dapat menjadi solusi ketika medium pemasaran mereka di jalur selain tol mulai tergerus,” jelasnya. *(Yustinus Andri)*

Judul	Desain Akan Diubah demi Kenyamanan	Tanggal	Selasa, 11 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Hal. 19)		
Resume	Kementerian PUPR akan mengubah desain rest area agar tidak terjadi penumpukan kendaraan pada musim mudik mendatang		

► TEMPAT ISTIRAHAT & PELAYANAN JALAN TOL

Desain Akan Diubah demi Kenyamanan

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengubah desain dari tempat istirahat dan pelayanan atau *rest area* agar tidak terjadi penumpukan kendaraan pada musim mudik Lebaran pada masa mendatang.

Krisna R. Kiantri
krisna.pupr@pnsrnl.com

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa melihat dari arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini, pihaknya akan membangun tempat istirahat dengan dua kondisi ke depannya.

"Orang kita ini kan malas, bukannya apa, mungkin sudah capek. Jadi, misalnya, mau ke toilet, turun mobil mau ke depannya toilet. Malas jalan. Itu akan coba kami evaluasi, misalnya, parkirnya agak jauh seperti di *supermarket* itu," ujarnya sesuai halahibahat Kementerian PUPR, Senin (10/6).

Selain itu, Basuki menambahkan bahwa pihaknya juga akan mengevaluasi letak tempat istirahat agar tidak persis di pinggir jalan tol sehingga tidak menghambat kendaraan yang melintas. Sebagai percontohan adalah tempat istirahat dan pelayanan (TIP) yang terletak di Ungaran, Jawa Tengah yang berada di KM 429 pada ruas jalan tol Semarang—Solo. Tempat istirahat ini diklaim termegah di Indonesia.

Ke depannya, TIP ini akan menjadi destinasi wisata dengan adanya penginapan dan penyewa-penyewa tempat berjualan yang lengkap.

Basuki juga telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan terkait dengan pe-

► Kementerian PUPR akan mengevaluasi letak tempat istirahat agar tidak persis di pinggir jalan tol.

► BPJT berharap agar pembangunan tempat istirahat yang akan dibangun dalam skala besar seperti di Ungaran.

nambahan fungsi TIP sebagai terminal seiring dengan evaluasi tempat istirahat pada masa mendatang.

"Itu kemarin saya bilang Pak Menhub, misalnya, mau dipakai terminal tol harus didesain masuk bukan yang kayak sekarang ini *existing*. Wah, itu bahaya!" paparnya.

Penambahan fungsi terminal di dalam TIP juga muncul setelah Kementerian Perhubungan mengagagas trayek bus Trans-Jawa yang sepenuhnya melintas jalan tol.

Berdasarkan catatan Bisnis, penambahan fungsi terminal di TIP bakal menjadi babak baru dalam pengusahaan jalan tol.

Selama ini TIP tidak menyediakan

area untuk fungsi pemberangkatan dan pemberhentian penumpang.

Dalam Peraturan Menteri PUPR No. 10/ PRT/M/2018, fasilitas terminal juga tidak menjadi fasilitas yang harus disediakan oleh pengelola.

Angkutan penumpang sebetulnya bisa menurunkan dan menaikkan penumpang pada tempat yang ditentukan, yaitu terminal, halte, atau tambu pemberhentian. Akan tetapi, hal itu hanya berlaku untuk angkutan perkotaan atau pedesaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan dan Jalan.

BERBAGAI WACANA

Senada dengan Basuki, Kepala Badan Pengantar Jalan Tol Danang Prikhesit memang mengusulkan supaya adanya penumusan penyempurnaan Peraturan Menteri PUPR terkait dengan TI (tempat istirahat) dan TIP.

Ada berbagai wacana dan dorongan untuk melakukan redefinisi tentang TI dan TIP serta bagaimana akses ke fasilitas pelayanan tersebut dimodernisasi.

"Sejauh ini ada tiga konsep yang sudah

diwacanakan. *Rest area* destinasi, *logistics hub*, dan fasilitas transit antar moda angkutan penumpang. Kesemuanya belum terakomodasi di Permen PUPR yang ada, tentunya dinamika ini perlu dibahas," katanya belum lama ini.

Peraturan Menteri PUPR yang dimaksud adalah Permen PUPR nomor 10/ PRT/M/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol.

Danang berharap agar pembangunan tempat istirahat yang akan dibangun dalam skala besar seperti yang di Ungaran serta pembangunan *rest area* lainnya sudah menerapkan prinsip-prinsip TIP yang baru ini.

Sepanjang mudik Lebaran tahun ini, Kementerian PUPR melengkapi infrastruktur jalan tol ataupun jalan nasional dengan berbagai fasilitas untuk memperlancar arus mudik. Salah satunya adalah TIP.

Kementerian PUPR telah menyiapkan 85 TI/TIP di sepanjang ruas tol Trans-Jawa yang terletak setiap 20 kilometer.

Sementara itu, untuk jalan tol Trans-Sumatra terdapat 15 TI/TIP di Medan, 7 di Bukauheni—Terbanggi Besar, dan 7 di Pematang Panggang—Kayu Agung. 

Judul	Berita Foto	Tanggal	Selasa, 11 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Hal. 19)		
Resume	Kementerian PUPR dan pengembang optimis akan dapat lebih semangat membangun rumah warga hingga mencapai Sejuta Rumah		

► TARGET SEJUTA RUMAH



Bisnis/Dedi Gunawan

Deretan rumah penduduk terlihat dari ketinggian di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, akhir pekan lalu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis pemerintah dan

pengembang dapat lebih semangat membangun rumah hingga mencapai target Sejuta Rumah di akhir tahun pascapeluncuran aturan baru.

Judul	Banyak Negara Tertarik Program Sejuta Rumah	Tanggal	Selasa, 11 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Hal. 19)		
Resume	Program Sejuta Rumah yang dilakukan Pemerintah Indonesia kini menjadi rol model pembangunan rumah di negara-negara berkembang lain		

► PASOKAN HUNIAN

Banyak Negara Tertarik Program Sejuta Rumah

Bisnis, JAKARTA — Persatuan Perusahaan Real estat Indonesia mengungkapkan bahwa program sejuta rumah kini makin banyak diminati dan dilirik oleh negara-negara berkembang di dunia.

“Program sejuta rumah yang dilakukan Pemerintah Indonesia kini sudah menjadi *role model* pembangunan *affordable housing* di negara-negara berkembang tentunya dengan berbagai penyesuaian,” kata Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata kepada *Bisnis*, Senin (10/6).

Menurut Eman, sapaan Soelaeman, perwakilan negara yang telah berbin-cang langsung kepadanya dan berminat terhadap program sejuta rumah adalah India, Nigeria, dan beberapa lain.

Negara-negara berkembang tersebut, tertarik terhadap konsep pemerintah yang mana program rumah rakyat sebagai kewajiban pemerintah bisa melibatkan sektor swasta lebih banyak membangun rumah murah. “Artinya pemerintah membuat kebijakan bagaimana mengedepankan peran swasta dalam membangun rumah rakyat, mereka tertarik akan hal itu,” tuturnya.

REI sebagai garda terdepan swasta berkontribusi cukup signifikan dalam program sejuta rumah. Pada 2017, REI

membangun 374.000 unit terdiri atas rumah bersubsidi 206.000 unit dan 168.000 rumah nonsubsidi.

Adapun, pada 2018, REI kembali membangun rumah sebanyak 389.000 unit, terdiri atas 214.000 rumah bersubsidi dan 175.000 rumah nonsubsidi.

Sementara itu, Eman mendapatkan Medali Kehormatan (Medal of Honor) dari Federasi Real Estat Dunia (FIABCI) dan dikukuhkan sebagai anggota Dewan Direktur FIABCI Dunia pada FIABCI World Congress ke-70 yang berlangsung pada 27—31 Mei 2019 di Moskow, Rusia.

Presiden FIABCI Dunia Assen Makdonov mengatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir, FIABCI Indonesia telah melakukan lompatan besar dan telah menjadi salah satu babak yang paling berpengaruh bagi FIABCI Dunia.

Hal ini dikarenakan banyak program kerja yang telah dilaksanakan oleh FIABCI Indonesia, baik di level nasional maupun internasional.

Assen juga menuturkan bahwa Soelaeman yang juga Presiden FIABCI Asia Pasifik turut berperan aktif dan mengampanyekan peran swasta dalam mendukung program Pemerintah Indonesia dalam forum internasional khususnya program sejuta rumah.

(Putri Z. Salsabila)

Judul	Opini	Tanggal	Selasa, 11 Juni 2019
Media	Media Indonesia (Hal. 6)		
Resume	Paradoks kemajuan perkotaan, si sisi banyak masyarakat yang menikmati kemajuan ekonomi masih banyak yang mengalami kekurangan		

Paradoks Kemajuan Perkotaan

Razali Ritonga

Pemerhati fenomena sosial-kependudukan

AGENDA utama pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan pendapatan per kapita rata-rata mencapai \$12.500 per tahun.

Perubahan kebijakan dari operasi yustisi ke layanan jasa kependudukan ini juga disertai dengan perluasan cakupan objek sasaran, yang semula pada penduduk kelompok menengah bawah, kini ke semua kelompok, termasuk kelompok atas. Hal ini menurut Pemprov DKI dinikmati untuk memandatkan pendatang secara lengkap guna mengoptimalkan peran jumlah penduduk ke Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa perubahan kebijakan ini lantaran tak ingin semesta menyempit Jakarta bagi warga daerah (Media Indonesia, 31/3). Kebijakan Pemprov DKI itu kiranya perlu dipertimbangkan untuk diadopsi pemerintah kota lainnya di Tanah Air. Itu karena urbanisasi merupakan fenomena alamiah yang terjadi secara universal dan hal itu merupakan hak asasi manusia untuk bertempat tinggal.

Atas dasar itu, pendatang ke perkotaan sepatutnya telah

perlu dibatasi, apalagi dilindungi. Namun, perlu diarahkan dan dibina agar tidak menimbulkan masalah di perkotaan. Bahkan, jika para pendatang diintegrasikan dengan baik, pada waktunya akan berkontribusi meningkatkan produktivitas perkotaan. Hal itu ditunjukkan karena pendatang merupakan penyuplai tenaga kerja yang berperan penting dengan pengembangan infrastruktur, industri, perdagangan, dan jasa di perkotaan.

Kontribusi penduduk perkotaan pada aspek ekonomi kini bahkan memengaruhi besaran produk domestik bruto (PDB) nasional di hampir seluruh negara. Secara global, menurut laporan badan PBB pada 2012, misalnya, dari 54% penduduk perkotaan menghasilkan tidak kurang dari 80% PDB dunia.

Paradoks

Namun, kemampuan penduduk dalam meningkatkan ekonomi perkotaan itu sayangnya tidak disertai kemampuan pemerintah kota melayani aneka kebutuhan seluruh warganya. Kemajuan perkotaan hanya dirasakan sebagian penduduknya, sedangkan sisanya lebih dalam kekurangan.

Kesenjangan internal perkotaan (tersebar arak dipartisi) itu merupakan paradoks ke-

majuan perkotaan. Bahkan kemajuan perkotaan, khususnya DKI Jakarta masih diburui paradoks lainnya, yakni masalah banjir dan sampah.

Meraka yang tetap dalam kekurangan itu umumnya



settlement.

Lelaki jauh, UN-Habitat menyimpulkan, informal settlement merupakan permukiman dengan salah satu atau kombinasi dari sejumlah faktor, seperti kualitas perumahan yang buruk, padat penghuni, minim akses terhadap air bersih, tidak memiliki sanitasi yang memadai, dan keamanan yang kurang terjaga.

Maka dari itu, jika tidak dilakukan pembenahan terhadap pendatang, hal itu akan memperparah penduduk perkotaan dan dikawatirkan kian memperparah kondisi permukiman informal. Bahkan, permukiman informal yang tersebar di sejumlah lokasi di perkotaan rawan menjadi kantong-kantong pengangguran.

Persentase tingginya angka pengangguran di perkotaan yang umumnya berada di permukiman informal merupakan salah satu wujud nyata paradoks kemajuan ekonomi perkotaan. Fenomena ini umum terjadi di sejumlah negara maju maupun berkembang.

Di Inggris, Korea Selatan, Belanda, dan Amerika, misalnya, sekitar 10% dari total pengangguran di masing-masing negara itu bermukim di perkotaan (OECD, 2006a). Di Indonesia, berdasarkan hasil Survei Februari 2019, sekitar 64,6% dari total pengangguran nasional bermukim di perkotaan.

Persempit kesenjangan

Maka dari itu, Pemprov DKI dan pemerintah kota lainnya di Tanah Air perlu mengoptimalkan kesenjangan internal di daerahnya agar tidak menimbulkan paradoks kemajuan perkotaan. Adapun aspek terpenting untuk mengatasi kesenjangan itu ialah dengan menciptakan kesempatan kerja bukan hanya bagi pendatang, melainkan juga bagi penduduk lokal yang menganggur.

Untuk penciptaan kesempatan kerja, khususnya bagi pendatang, pemerintah perlu melakukan upaya lebih lanjut untuk potensi pendatang. Bagi Pemprov DKI khususnya, pemerintah sepatutnya tidak berhenti hanya pada layanan jasa kependudukan. Akan tetapi, perlu mendinkaligasi dengan peningkatan keterampilan dan penciptaan kesempatan kerja.

Selain itu, pemerintah kota perlu memperluas cakupan pembangunan tempat tinggal yang layak huni dengan mengoptimalkan permukiman informal atau memindahkan penduduk.

Adapun pengertian tempat tinggal layak huni menurut Rencana PDB bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang diklasifikasi pada 1964 ialah tempat tinggal yang memenuhi persyaratan sejumlah aspek. Misalnya, air bersih, jumlah, bahan bakar memasak, lampu penerangan, pendingin ruangan, fasilitas mencuci, tempat buang sampah, taman bermain, taman sekolah, dan

layanan kesehatan.

Namun, di tengah keterbatasan lahan di perkotaan, pembangunan tempat tinggal layak huni memang tidak mungkin dilakukan secara horizontal, tetapi secara vertikal.

Dalam konteks ini, pemerintah pada masa lalu pernah berencana mendirikan 1.000 rumah rumah susun bersubsidi di Jakarta sejak 2007-2012. Namun, rencana pembangunan rumah susun bersubsidi itu terbentur pada 2010. Untuk itu, pemerintah berencana perlu mempertimbangkan kembali untuk meneruskan pembangunan rumah susun bersubsidi dimasa depan.

Pemerintah kota kini memang perlu bekerja ekstra keras karena jumlah penduduknya terus bertambah besar. Adapun pada skala global, penduduk perkotaan berjumlah 3,2 miliar jiwa setiap harinya atau 80 juta jiwa per tahun. Pada 2030, diperkirakan 60% atau 5,2 miliar penduduk bumi akan tinggal di perkotaan (UNICEF, 2018).

Atas dasar itu, PBB mengajak seluruh kepala negara untuk memiliki komitmen memperhalus kebijakan perkotaan agar tidak terjadi paradoks kemajuan perkotaan. Adapun ajakan itu tertuang dalam goal ke-11 pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), yaitu mewujudkan kota-kota yang inklusif, aman, serta memiliki ketahanan dan berkelanjutan (SDG, 2015a).

Judul	Cegah Penumpukan, Pengaturan Rest Area akan Dibenahi	Tanggal	Selasa, 11 Juni 2019
Media	Media Indonesia (Hal. 10)		
Resume	Dinilai perlu ada manajemen yang baik dalam pengelolaan rest area		

Cegah Penumpukan, Pengaturan Rest Area akan Dibenahi

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengkritisi padatnya tempat peristirahatan atau *rest area* pada arus mudik-balik Lebaran 2019.

Menurut Basuki, perlu ada manajemen yang baik dalam pengelolaan tempat peristirahatan itu, terutama di musim puncak seperti arus mudik dan balik Lebaran yang selalu padat dan menimbulkan kemacetan.

"Seberapa pun *rest area*, tidak akan cukup dengan kondisi yang seperti ini. Di Palimanan, Kalikangkung, itu kondisi normal 17 ribu kendaraan. Kemarin, 68 ribu kendaraan, dan itu belum puncaknya," katanya ditemui di Kementerian PU-Pera Jakarta, kemarin.

Kebijakan satu arah yang diterapkan pun masih membuat kondisi tempat peristirahatan penuh. Padahal, dengan kebijakan satu arah, *rest area* baik arah Jakarta maupun arah sebaliknya bisa dipakai semua.

"Satu arah pun juga masih penuh. Padahal, dengan satu arah, *rest area* di kiri kanan bisa dipakai semua," ujarnya

"Seberapa pun *rest area*, tidak akan cukup dengan kondisi yang seperti ini. Di Palimanan, Kalikangkung, itu kondisi normal 17 ribu kendaraan. Kemarin, 68 ribu kendaraan, dan itu belum puncaknya."

Basuki Hadimuljono
Menteri PU-Pera

Sebagai evaluasi, Basuki mengatakan ke depan pemerintah akan mengupayakan adanya perubahan desain parkir di tempat peristirahatan. Hal itu dilakukan guna mengakomodasi pemudik yang ingin beristirahat di sela perjalanan mudik atau balik.

"Mungkin akan kita coba nanti desain parkirnya. Sekarang parkirnya *ngacak*. Orang kita ini malas, mungkin karena sudah *capek*, jadi kalau mau ke toilet ya harus depan toilet turunnya, tidak mau jalan sehingga semua maunya di dekat toilet (parkirnya)," katanya.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan akan meregulasikan sistem satu arah (*one way*) tol saat arus mudik dan balik Lebaran untuk mengatur pemudik yang melintas sehingga tidak terjadi penumpukan.

"Tapi kan ini pilihan, lain kali yang kita lakukan ialah *law enforcement*. Apa yang akan kita lakukan nanti kita pikirkan," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kemenhub, kemarin.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan ke depannya skema satu arah akan diatur dalam bentuk peraturan menteri.

Budi mengatakan nantinya satu arah akan dibatasi selama dua hari saja untuk mendorong pemudik melintas pada hari tersebut. (Ant/E-1)

Judul	Pemerintah Terus Bangun Rumah Tahan Gempa	Tanggal	Selasa, 11 Juni 2019
Media	Media Indonesia (Hal. 11)		
Resume	Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 8.500 rumah tahan gempa pada 2019		

HUNIAN TETAP:
Awaludin menggendong anaknya di depan hunian tetap korban gempa berbentuk keong di Dusun Montong Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, NTB, beberapa waktu lalu. Rumah seluas 8 meter x 8 meter berbahan campuran semen, kapur, pasir, kayu dan besi berbentuk rumah keong itu tahan gempa hingga 10 SR tersebut.



KANTAPAHWAS SUBAID

Pemerintah Terus Bangun Rumah Tahan Gempa

Kementerian PU-Pera menargetkan pembangunan 8.500 rumah tahan gempa pada 2019.

HAUFAN HASYIM SALENGKE
haufan_hasyim@mediaindonesia.com

LETAK geografis di tengah Cincin Api Pasifik membuat Indonesia cukup akrab dengan bencana gempa bumi. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi sejumlah gempa besar, di antaranya mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat, serta Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Ketika gempa menerjang, objek paling terpengaruh, yaitu bangunan, terutama rumah penduduk. Ini akibat sebagian besar rumah yang rusak dibangun dengan konstruksi yang tidak tahan gempa.

Untuk itu, pemerintah terus membangun rumah tahan gempa untuk merehabilitasi

wilayah-wilayah terdampak di sejumlah daerah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menargetkan pembangunan setidaknya 8.500 rumah rehabilitasi atau rumah rekonstruksi tahan gempa untuk tahun anggaran 2019.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PU-Pera, Khalawi Abdul Hamid, mengatakan ribuan rumah rehab dan rumah rekonstruksi itu dibangun dengan teknologi atau sistem rumah instan sederhana sehat (Risha). Risha berkonsep *knock down* yang pembangunannya tidak membutuhkan semen dan bata.

Pembangunan Risha cukup menggabungkan panel-panel beton dengan baut. Dengan demikian, rumah ini dapat berdiri kukuh dalam waktu jauh lebih cepat. "Waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan rumah tahan gempa tipe 36, mulai pembuatan panel sampai selesai, selama 30 hari," ujar Khalawi saat dihubungi *Media Indonesia*, kemarin.

Setelah melalui proses pengembangan sejak 2004, rumah itu diklaim memenuhi

standar nasional Indonesia (SNI). Risha teruji tahan gempa hingga 8 skala Richter (SR) dan 8 *modified mercalli intensity* (MMI).

Risha telah berdiri di lebih dari 60 wilayah yang didominasi warga kelas menengah ke bawah. Wilayah terbanyak, seperti Sumatra bagian barat, Jawa bagian selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Sejauh ini yang telah dibangun pihaknya sebanyak 1.300 unit tipe 36 sejak tahun anggaran 2015. Selain tipe tersebut, pernah dibangun pula tipe 27 dan tipe 45. Dari segi biaya juga sangat kompetitif. Hanya sekitar Rp50 juta, warga dapat memiliki satu unit tipe 36 dilengkapi dengan kamar mandi.

Bale Kohana

Bukan cuma Kementerian PU-Pera, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pun meluncurkan prototipe rumah tahan gempa yang diperkenalkan sebagai Bale Kohana. Rumah ini bersifat permanen dan dapat dibongkar pasang untuk daerah rawan gempa.

"Kita memang harus semakin siap karena Indonesia ingin menjadi negara yang tangguh bencana," tutur Kepala BPPT Hamam Riza di Tangerang Selatan, Banten, belum lama ini.

Rumah tahan gempa bertipe 36 itu dibangun dengan memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang tamu, dan ruang dapur. Rumah itu dihargai sekitar Rp170 juta-Rp175 juta. Pihaknya berencana mengirim Bale Kohana ke Lombok. Rumah tersebut dibangun di lahan hunian permanen, bukan lahan hunian sementara.

Bale Kohana dinamakan rumah komposit karena terdiri dari berbagai bahan material, khususnya komposit polimer yang kuat dan ringan. Rumah itu didesain dengan konstruksi modular, *pre-assembly*, dan sistem *join interlock* yang dapat dibangun dengan waktu yang relatif singkat.

Dalam simulasi, rumah itu mampu bertahan dan tidak roboh ketika diguncang gempa magnitudo 7. BPPT akan meningkatkan ketahanan rumah tersebut pada guncangan gempa yang lebih kuat.

Prototipe itu dibangun dalam waktu tiga pekan. Tapi nanti ditargetkan rumah itu dapat dibangun dalam waktu sepekan.

Kuda-kuda atau struktur Bale Kohana juga dipasang langsung dengan genteng metal. Ketika terjadi guncangan besar, struktur ini tidak akan patah atau roboh seperti rumah konvensional dengan tembok bata dan genteng tanah liat atau keramik. (S-4)

Judul	Program Sejuta Rumah Raih Penghargaan	Tanggal	Selasa, 11 Juni 2019
Media	Media Indonesia (Hal. 11)		
Resume	Penghargaan diberikan Federasi Real Estate Dunia (FIABCI) dalam kongres dunia yang berlangsung di Moskow, Rusia.		



ANTARA/ANIS EFIZUDIN

RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA: Pengendara sepeda motor melintas di kompleks rumah susun sederhana sewa untuk masyarakat berpenghasilan rendah Mancasan, Gulon, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Penyediaan Perumahan menargetkan pembangunan 550 ribu unit rumah susun dalam rencana strategis 2014-2019.

Program Sejuta Rumah Raih Penghargaan

PROGRAM sejuta rumah yang digulirkan dalam rangka menyediakan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) mendapat penghargaan dari Federasi Real Estate Dunia (FIABCI) dalam kongres dunia ke-70 yang berlangsung 27-31 Mei 2019 di World Trade Center, Moskow, Rusia.

"Penghargaan berupa medali kehormatan (*medal of honor*) itu diberikan kepada saya karena dianggap berjasa dalam memperkenalkan program perumahan pemerintah, khususnya kebijakan sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," kata Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata, di Jakarta, kemarin.

Penghargaan juga diberikan karena FIABCI atau Federation Internationale des Administrateurs de Bien-Conselis Immobiliers menilai jasa-jasa kepada Ketua Umum REI yang juga menjabat Ketua FIABCI Asia Pacific karena upayanya mendorong perkembangan industri *real estate* Asia Pasifik, terutama di negara berkembang. Penghargaan tersebut diterimanya beserta jajaran anggota dan pengurus REI lainnya.

Dalam siaran persnya, President FIABCI Dunia, Assen Makedonov mengatakan, dalam

dua tahun terakhir FIABCI Indonesia telah melakukan lompatan besar dan telah menjadi salah satu *chapter* paling berpengaruh di FIABCI Dunia. Hal itu karena banyak program kerja yang sudah dilaksanakan FIABCI Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, kata Assen, tidak mengherankan apabila memilih Soelaeman menjadi President FIABCI Regional Asia Pasifik untuk kedua kalinya (2019-2020), yang sebelumnya terpilih di Business Meeting Athena, Yunani, pada Desember 2017, untuk posisi yang sama masa bakti 2018-2019.

Soelaeman mengatakan, semua penghargaan tersebut merupakan anugerah bersamaan dengan momentum perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah dan yang lebih berharga dalam ajang tersebut FIABCI juga mengukuhkan dirinya sebagai dewan direktur FIABCI Dunia.

Pada pergelaran itu juga Indonesia mendapatkan penghargaan *Prix D'Excellence Award*, yang merupakan penghargaan tertinggi untuk karya-karya terbaik dalam pembangunan *real estate* di dunia. Delegasi yang meraih penghargaan, di antaranya Four Seasons Jakarta, Citra Maja Raya, Metropolitan Mall Cileungsi, dan Bumi Serpong Damai. (Ant/S-1)

Judul	Target 2,4 Juta Wisman	Tanggal	Selasa, 11 Juni 2019
Media	Kompas (Hal. 15)		
Resume	Pemkot Batam perbaiki akses transportasi dan mengenalkan destinasi baru untuk wisatawan		

Target 2,4 Juta Wisman

Pemkot Batam membenahi akses transportasi dan mengenalkan destinasi baru untuk menarik wisman. Lonjakan jumlah kunjungan terjadi pada wisatawan dari India.

BATAM, KOMPAS — Kota Batam berbenah untuk menggaet kunjungan 2,4 juta wisatawan mancanegara tahun 2019. Untuk itu, sejumlah destinasi wisata baru dikenalkan dan akses transportasi ditingkatkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Batam pada periode 2014-2017 rata-rata 1,4 juta orang. Peningkatan jumlah kunjungan wisman terjadi pada 2018, yakni 1.877.224 wisman.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Batam Ardiwinata, Senin (10/6/2019), mengatakan, pengenalan destinasi baru dan perbaikan akses transportasi menjadi kunci utama menarik wisman. Daya tarik Batam adalah fasilitas lengkap

dan modern, tetapi bebas kemacetan.

Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Kota Batam memperbaiki dan memperlebar akses utama. Pengerjaannya ditargetkan rampung enam tahun lagi dan Batam bebas dari jalan macet dan rusak pada 2025.

"Akses transportasi harus ikut ditingkatkan bersamaan pembangunan tujuan wisata baru. Percuma kalau wisatanya bagus, tetapi wisman kehabisan waktu karena macet atau infrastruktur transportasinya tidak memadai," ujar Ardi.

Tujuan utama ke Batam adalah wisata laut, seperti koral di Pulau Abang. Lainnya, wisata kuliner hidangan laut dan wisata religi kebudayaan Islam.

Ardi berharap pembangunan destinasi baru, seperti Masjid

Agung Sultan Mahmud Riayat Syah, bisa jadi magnet baru wisata religi. Masjid di Kecamatan Sagulung yang akan diresmikan pada 20 September 2019 itu digadang-gadang terbesar dan termegah di Sumatera.

Saat ini, kunjungan wisman didominasi warga Singapura dan Malaysia. Setiap tahun, 72 persen dari total jumlah wisman di Batam berasal dari kedua negara tersebut.

Wisman India

Peningkatan signifikan jumlah kunjungan wisatawan di Batam ditunjukkan wisman India. Kunjungannya naik hampir dua kali lipat pada 2018 menjadi 113.557 wisman dari tahun sebelumnya 58.000 wisman. Wisatawan India menyumbang 6 persen total kunjungan atau pe-

ringkat ketiga wisman.

Pada libur Idul Fitri, Sabtu (8/6), 40 agen perjalanan wisata India mendatangi Batam. Merespons lonjakan jumlah kunjungan wisman India itu, para agen secara khusus berkunjung untuk merancang agenda perjalanan wisata baru agar menarik lebih banyak peminat.

"Kementerian Pariwisata tahun ini menargetkan Batam dan Bali jadi daya tarik utama menggaet 800.000 wisman India. Sejumlah tempat di Batam sangat disukai wisman India, misalnya Pura Sri Lalitha Maha Thirupura Sundari dan Wihara Duta Maitreya," kata Ardi.

Gairah wisata di Batam juga menarik kedatangan kapal pesiar berbendera Malta, Star

Clipper, yang Jumat pekan lalu membawa 74 wisatawan dari 13 negara. "Kapal itu menjadi yang pertama singgah sejak terakhir Batam disandari kapal pesiar pada 2010," ujar Ardi.

Tumbuhnya jumlah wisman turut meningkatkan perputaran uang di Batam. "Kalau pertumbuhan wisman bisa dikembangkan sambil menunggu sektor industri kembali bergairah, hal itu akan menyelamatkan Batam," kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

Hal itu pula yang mendorong Pemkot Batam menggandeng Badan Ekonomi Kreatif mengembangkan 16 subsektor usaha kreatif. Pelaku ekonomi kreatif bidang kuliner, busana, film, dan sejenisnya akan diberi pelatihan dan modal mengembangkan usaha. (NDU)

Judul	Angkutan Massal Mendesak Dibenahi	Tanggal	Selasa, 11 Juni 2019
Media	Kompas (Hal. 1)		
Resume	Angkutan massal untuk mudik Lebaran mendesak dibenahi agar menarik minat masyarakat		

Angkutan Massal Mendesak Dibenahi

Angkutan massal untuk mudik Lebaran mendesak dibenahi agar menarik minat masyarakat. Peminat angkutan umum tinggi asalkan fasilitasnya memadai.

JAKARTA, KOMPAS — Hingga hari ketiga se usai Lebaran (H+3), jumlah pengguna angkutan umum menurun, tetapi di lain sisi mobil pribadi justru membeludak di Jalan Tol Trans-Jawa. Agar masyarakat mau beralih moda, pemerintah perlu membenahi transportasi publik untuk keperluan mudik Lebaran.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pengguna angkutan umum pada 2019 sejak 29 Mei (H-7) hingga 9 Juni (H+3) sebanyak 12,73 juta orang atau turun 8,5 persen dibandingkan dengan jumlah pengguna angkutan umum pada periode yang sama tahun 2018 sebanyak 13,9 juta penumpang.

Dari semua moda transportasi, jumlah pengguna pesawat dan angkutan jalan yang merosot tajam. Jumlah penumpang pesawat turun dari 3,5 juta penumpang pada 2018 menjadi 2,5 juta orang pada 2019.

Adapun jumlah pengguna angkutan jalan, termasuk bus, turun 13,7 persen, dari 3 juta pengguna pada 2018 menjadi 2,63 juta orang pada 2019.

Kondisi ini terlihat di terminal bus. Di Terminal Kampung Rambutan, misalnya, jumlah penumpang bus yang berangkat mudik pada Lebaran 2019 dari H-7 hingga H-1 sebanyak 82.820 penumpang atau turun ketimbang tahun lalu yang sebanyak 93.400 orang.

Untuk itu, pemerintah didesak membenahi angkutan massal Lebaran. "Penggunaan angkutan umum memang harus didorong karena kalau terus mengandalkan jalan tol dan kendaraan pribadi, kemacetan akan selalu terjadi," kata pakar transportasi Institut Teknologi Bandung, Sony Sulaksono, Senin (10/6/2019).

Sony menilai, pemerintah

(Bersambung ke hlm 11 kol 1-2)

Angkutan Massal Mendesak

(Sambungan dari halaman 1)

perlu membenahi sejumlah hal untuk mendorong minat masyarakat menggunakan angkutan umum saat mudik. Di sektor angkutan bus, misalnya, pemerintah harus membenahi kondisi dan fasilitas di terminal agar lebih nyaman, termasuk menyediakan tempat parkir sepeda motor yang memadai di terminal.

Selain itu, terminal-terminal besar yang ada di sejumlah kota juga perlu diintegrasikan dengan akses keluar dan masuk jalan tol untuk mempercepat waktu tempuh. Selain bus, kapasitas kereta api juga dapat ditingkatkan dengan cara merampungkan pembangunan rel ganda di jalur selatan Jawa.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Deddy Herlambang mengingatkan, pemerintah seharusnya tidak hanya mengandalkan jalan tol untuk memperlancar arus mudik. Sebab, jalan tol tetap berpotensi macet karena tingginya pertumbuhan kendaraan pribadi.

Oleh karena itu, Deddy menyatakan, pemerintah semestinya memberikan fasilitas untuk menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

Kendaraan di jalan tol

Di sisi lain, volume kendaraan pribadi membeludak saat arus mudik dan balik Lebaran sehingga memicu kepadatan di Jalan Tol Trans-Jawa. Kemacetan terparah terjadi pada Minggu (9/6) siang hingga Senin dini hari yang kebanyakan dipicu akibat antrean kendaraan ke tempat istirahat.

Pada Minggu malam sekitar pukul 22.30, perjalanan dari Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama menuju Semanggi, Jakarta, dengan jarak sekitar 80 kilometer, misalnya, ditempuh selama 4,5 jam, sedangkan pada hari biasa sekitar 2 jam.

Berdasarkan data PT Jasa Marga, jumlah kendaraan yang keluar Jakarta saat mudik dengan melintasi GT Cikampek Utama, GT Kalihurip Utama, GT Cikupa, dan GT Ciawi dari H-7 hingga H-1 mencapai 1,2 juta unit. Adapun jumlah kendaraan pada saat arus balik dari H+1 hingga H+3 mencapai 719.654 kendaraan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui, salah satu penyumbang kepadatan di jalur mudik adalah kendaraan pribadi. Untuk itu, tahun depan pihaknya akan memprioritaskan fasilitas angkutan massal.

"Mungkin yang dapat dilakukan dalam jangka setahun mendatang adalah perbaikan fasilitas di moda bus dan kereta api," ujar Budi Karya, seraya menyebutkan, peminat angkutan umum tahun ini naik.

Pada Senin sore, lalu lintas arus balik sudah mulai lancar. Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Inspektur Jenderal Refdi Andri menyatakan, puncak arus balik terjadi pada H+4 atau hari Minggu kemarin. Untuk itu, rekayasa lalu lintas, termasuk sistem satu arah, tidak diberlakukan lagi.

"Kami perkirakan, pemudik masih akan kembali ke Jakarta dalam satu hari hingga lima hari ke depan," kata Refdi Andri di Cikampek.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengapresiasi keberlangsungan mudik Lebaran 2019. Sebab, mudik tahun ini lebih baik daripada tahun lalu dilihat dari jumlah kecelakaan yang berkurang.

Berdasarkan data Polri, jumlah kecelakaan dari H-7 hingga H+3 Lebaran 2019 sebanyak 529 kejadian, turun sebanyak 65 persen dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebanyak 1.491 kejadian.

(DIV/HRS/FRD/DVD/SKA/
AIN/TAM/EDN/NAD/ARN/
RTG/DIT/DKA/NCA)